

Kontribusi Unik Proses Rekonsiliasi Berbasis Komunitas di Timor

Oleh: Fausto Belo Ximenes (JSMP)

28 May 2004

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) didirikan untuk mengakomodir keinginan untuk rekonsiliasi di antara para pemimpin dan masyarakat Timor Timur, dan komisi ini berupaya mengungkapkan kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. CAVR sekarang ini diharapkan menyerahkan laporan akhirnya kepada Presiden Republik Demokratis Timor Leste, pada Oktober tahun ini. Itu sebabnya sekarang waktu yang tepat untuk menganalisa operasinya, termasuk kontribusi yang telah diberikan kepada proses keadilan dan rekonsiliasi di Timor Timur baru.

Meski makalah ini tidak menyajikan analisis menyeluruh tentang mandat CAVR, makalah ini bertujuan memberi analisis kecil dan evaluasi terhadap kontribusi khusus yang telah diberikan CAVR melalui mandatnya yang terkenal tentang "Proses Rekonsiliasi Berbasis Komunitas" (CRP). Berdasarkan peraturan yang memerintahkan pendirian CAVR, makalah ini berusaha menganalisa kontradiksi yang telah muncul dalam pemaknaan Proses Rekonsiliasi Berbasis Komunitas sebagai sebuah cara non-hukuman yang bertujuan memberi kekebalan hukum kepada para pelaku pelanggaran HAM di masa lalu.

Sebagaimana ditulis dalam makalah ini, Proses Rekonsiliasi Berbasis-Masyarakat yang difasilitasi oleh CAVR ini tidak memberikan kekebalan hukum atau memberi kesempatan bagi deponen untuk lari dari tanggung jawab mereka. Lebih jauh lagi, pengungkapan besar-besaran dan permintaan maaf publik yang diminta dari para saksi tidak berarti bahwa deponen akan bebas dari pengadilan, sebagaimana yang muncul dalam komisi-komisi kebenaran dan rekonsiliasi lainnya.

Dalam Proses Rekonsiliasi Berbasis-Masyarakat yang difasilitasi oleh CAVR, seorang *deponent* diminta untuk melaksanakan "aksi rekonsiliasi komunitas" yang direkomendasikan oleh CRP Panel setelah pernyataannya dikaji ulang oleh Kantor Penuntut Umum. Hanya dalam kasus-kasus di mana Kantor Pengadilan Umum tidak menemukan kejahatan serius dan di mana mereka memilih untuk tidak melaksanakan yurisdiksinya atas pernyataan yang dimaksud, seorang deponen dapat berpartisipasi dalam Proses Rekonsiliasi Berbasis Komunitas. Kegagalan memenuhi syarat-syarat ini akan menghasilkan tuntutan peradilan atau ganti rugi atau penahanan dalam waktu tertentu.

Dalam melihat prosedur seperti disebutkan di atas, cukup adil berpendapat bahwa proses ini bukan hanya Proses Rekonsiliasi Berbasis-Masyarakat, tapi sesungguhnya merupakan Proses Rekonsiliasi dan Keadilan Berbasis-Masyarakat –sebuah proses yang adil menurut komunitas, berbeda dengan proses peradilan formal yang diterapkan oleh sidang pengadilan hukum. Itu memang proses Proses Rekonsiliasi dan Keadilan

Berbasis-Masyarakat karena fakta bahwa para deponen yang ingin berpartisipasi dalam Proses Rekonsiliasi Berbasis-Masyarakat harus lulus melalui prosedur ketat, yang menyertakan kewajiban deponen untuk melakukan kerja komunitas sebagaimana direkomendasi oleh Panel CRP untuk beberapa waktu untuk mengompensasikan tindakan mereka di masa lalu.

Untuk itu, analisis yang hati-hati tentang prosedur Proses Rekonsiliasi Berbasis-Komunitas dan hubungannya dengan sistem peradilan resmi adalah hal yang amat penting dalam menghindari miskonsepsi tentang Proses Rekonsiliasi Berbasis-Komunitas yang difasilitasi CAVR. Meski diakui bahwa Proses Rekonsiliasi Berbasis-Komunitas seharusnya tidak dianggap sebagai alternatif bagi sistem keadilan formal, penting kiranya mencatat bahwa Proses Rekonsiliasi Berbasis-Komunitas telah memberi kontribusi luar biasa tidak hanya kepada proses rekonsiliasi di Timor Timur, tapi juga kepada sistem peradilan resmi karena kemampuannya mengisi kekosongan yang diciptakan oleh sistem peradilan resmi sebagai akibat dari kapasitas yang terbatas. Proses Rekonsiliasi Berbasis-Komunitas telah membantu sistem peradilan formal dengan mengangkat beban pengadilan dan lebih jauh lagi memberi peluang kepada sistem peradilan formal untuk meningkatkan dan memperkuat diri untuk mampu melaksanakan mandat sepenuhnya ketika CAVR telah menyelesaikan tugas-tugasnya.

Lebih jauh lagi, melalui mandate dari Proses Rekonsiliasi Berbasis-Komunitas, CAVR telah membantu dalam mendukung repatriasi pengungsi berkat program informasi publik yang luas yang menjangkau tidak saja 13 distrik di Timor Timur, tapi juga provinsi Indonesia di Timor Barat tempat banyak pengungsi Timor Timur tinggal. Program informasi publik ini menjelaskan situasi sekarang di Timor Timur dan menggaris-bawahi prosedur untuk partisipasi dalam Proses Rekonsiliasi Berbasis-Komunitas. Hal ini penting karena langkanya informasi di kamp-kamp pengungsi di Timor Barat dan intimidasi terus menerus yang diderita para pengungsi oleh anggota kelompok milisi demi mencegah repatriasi mereka.

Untuk itu, makalah ini menyimpulkan bahwa Proses Rekonsiliasi Berbasis-Komunitas yang difasilitasi CAVR seharusnya tidak disamakan dengan penafsiran umum dan seragam dari Komisi Kebenaran lainnya, misalnya dengan membebaskan pelaku pelanggaran HAM dari akuntabilitas mereka. Tapi lebih, harus dipahami bahwa Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran bervariasi baik dalam bentuk dan mandat mereka, dan maka mereka berhak atas analisis lebih dalam tentang mandat spesifik mereka. Dalam kasus Timor Timur, Proses Rekonsiliasi Berbasis-Komunitas adalah proses yang membuat CAVR "unik" bila dibandingkan dengan Komisi Rekonsiliasi lain—mulai dari prosedur yang diterapkan hingga hubungannya dengan sistem peradilan formal. Untuk itu sangat direkomendasikan bahwa studi komprehensif lebih jauh tentang mandat spesifik ini harus dilakukan untuk memaparkan kemungkinan penerapan mandat yang berkelanjutan di masa depan.